

# REKONSTRUKSI PERAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT HUMANIS DAN PLURALIS

Oleh  
Rochmat Wahab

## **Pengantar**

Pendidikan Agama secara konvensional berfungsi untuk menjadikan anak beriman dan bertaqwa, serta berakhlak mulia, sehingga dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Dengan kata lain bahwa pendidikan agama dapat membantu peserta didik dalam membangun masyarakat agamis. Masyarakat agamis pada dasarnya memiliki pengertian luas, namun sering kali dipahami dengan pengertian terbatas, sehingga masyarakat agamis hanya menggambarkan masyarakat yang hanya menunjukkan ketaatan dalam menjalankan ritual-ritual agama saja.

Menyadari akan reduksi pengertian masyarakat agamis, maka diangkat berbagai konsep lain, di antaranya yaitu masyarakat humanis dan pluralis, yang merupakan bagian penting dari yang dicita-citakan oleh sistem pendidikan nasional. Masyarakat humanis dan pluralis diharapkan dapat merupakan suatu terminologi yang mampu menggambarkan lebih jelas tentang wujud masyarakat yang diobsesikan, terutama dikaitkan dengan konteks kehidupan dewasa ini.

Walaupun diakui bahwa pendidikan agama belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya untuk membangun masyarakat yang taat akan ajaran agamanya, pendidikan agama diharapkan mampu memerankan dirinya dalam membangun masyarakat humanis dan pluralis.

## **Masyarakat humanis dan pluralis**

Untuk dapat menghindarkan diri dari pengertian yang berseberangan, maka dianggap sangat perlu merumuskan apa yang dimaksudkan dengan masyarakat humanis dan pluralis. Masyarakat humanis adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki segala potensi diri yang unik, baik yang menyangkut aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Pada dasarnya manusia dapat diturunkan dari insan. Ali Syariati (Ma'allim, 2003), memahami insan dikaitkan dengan basyar, menegaskan bahwa insan memiliki arti lebih dekat dengan keunggulan dan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan (becoming), sebaliknya basyar lebih dekat dengan arti yang berkaitan dengan persoalan manusia sebagai makhluk biologi (being). Sementara itu Said Aqil dan Quraish Shihab (1992) (menegaskan bahwa insan secara lughawi berarti harmoni, akrab, atau intim, sehingga manusia diidealkan untuk selalu menjaga keharmonisan hidup. Dengan demikian masyarakat humanis dapat dipahami sebagai masyarakat yang benar-benar menjunjung tinggi dan mengapresiasi secara tulus harkat manusia dan fitrah manusia dengan segala sifatnya yang unik – baik

hamba Allah maupun khalifah di atas bumi, sehingga terwujud keharmonisan hidup.

Masyarakat pluralis pada hakekatnya secara sekilas dapat diartikan sebagai masyarakat yang plural atau beragama, namun dalam konteks ini dipahami sebagai masyarakat yang menghargai keberagaman anggota masyarakat lain yang memeluk agama lain. Keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan seharusnya dihadapi secara bijak. Allah berfirman: "Jika Tuhanmu menghendaki, maka tentunya semua manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman! Maka apakah kamu hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri, untuk beriman." (QS 10:99).

Setelah mengikuti uraian tersebut di atas, kiranya masyarakat humanis dan pluralis merupakan masyarakat yang secara fenomenal kita hadapi dewasa ini terutama dalam era demokrasi dan global.

### **Mengapa perlu rekonstruksi peran pendidikan agama**

Pendidikan agama pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diidealkan, yaitu mampu menghasilkan masyarakat yang religius. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam ternyata secara moral dan manusiawi belum mampu menunjukkan perilaku yang menunjang kedamaian, keselamatan, keamana, dan kenyamanan. Masih banyak perilaku-perilaku yang mengganggu dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Bahkan tidak sering kita dengar bahwa krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia bertumpu sekali pada krisis moral bangsa, baik secara individual maupun kolektif.

Yang sangat penting bahwa dewasa ini eksistensi pendidikan agama dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan menjadi sorotan tajam para tokoh agama. Memang hal ini bukan isu nasional saja, melainkan isu global yang juga dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Berdasarkan landasan legal-formal, sosiologis, pedagogis, dan psikologis, maka pendidikan agama menuut hemat saya merupakan "suatu keharusan" (a must), bukan lagi pilihan.

Menyadari akan kondisi obyektif tersebut, pendidikan agama sebagai sub sistem pendidikan nasional, secara langsung maupun tidak langsung perlu melakukan rekonstruksi peran pendidikan agama, dengan harapan kehadiran pendidikan agama di kemudian hari menjadi lebih strategis dalam ikut serta membangun masyarakat Indonesia, terutama masyarakat humanis dan pluralis.

### **Substansi pendidikan agama**

Dengan tanpa mengabaikan arti substansi pendidikan agama selama ini, substansi pendidikan agama lebih bersifat parsial dan bernunsa kognitif (termasuk substansi aqidah, ibadah, akhlak) sehingga sangatlah wajar jika terjadi reduksi terhadap eksistensi pendidikan agama. Aspek-aspek pendidikan agama tersebut memang penting, namun untuk dapat menjadikan pendidikan agama lebih berarti dan kontributif, maka substansinya perlu diformulasikan sekomprensif mungkin, sehingga perlu dikembangkan aspek lainnya, yaitu aspek amaliah yang bermakna, baik bersifat personal maupun sosial.

Selain daripada itu substansi perlu dikembangkan berdasarkan tugas perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan agama benar-benar dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara optimal. Sangatlah mungkin bahwa substansi yang dibuat dan dikembangkan kelompok siswa yang satu dan lainnya berbeda, sehingga diperlukan modifikasi atau penyesuaian materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perlakuan semacam ini merupakan perwujudan apresiasi terhadap keberadaan peserta didik yang memiliki keragaman.

### **Proses pendidikan agama**

Proses pendidikan agama selama ini cenderung masih dibatasi oleh program kurikuler secara tertulis dan dibatasi pada empat dinding. Padahal untuk menjadikan pendidikan agama yang fungsional, pendidikan agama seharusnya dikembangkan berdasarkan baik program kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Demikian juga program pendidikannya dapat dirumuskan baik secara tertulis, maupun tidak tertulis (*hidden curriculum*). Proses pendidikan agama yang selama ini hanya bergantung melalui aktivitas pengajaran, maka untuk efektifnya perlu dikembangkan melalui aktivitas pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan agama seharusnya dapat juga berlangsung di luar dinding kelas.

Aktivitas pendidikan agama yang selama ini lebih menuntut kegiatan intelektual, maka untuk dapat meningkatkan efektivitasnya, kegiatan pendidikan agama seharusnya diwarnai kegiatan lainnya, termasuk praktek beribadah dan muamalah dengan cara yang bijak, sebagai wujud pengembangan aspek personal dan sosial peserta didik, karena kedua aspek tersebut sangatlah penting dalam kehidupan setiap individu di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi manfaat dari proses yang demikian itu akan mendukung terbangunnya masyarakat humanis dan pluralis.

### **Penilaian pendidikan agama**

Adalah tidak diragukan, bahwa penilaian yang dilakukan untuk pendidikan agama cenderung lebih mengandalkan pada penilaian kognitif. Itu pun kadang-kadang juga masih dilakukan modifikasi. Padahal untuk idealnya, penilaian yang semacam itu belumlah cukup, bahkan jauh dari ideal. Sesuai dengan hakekat pendidikan agama, yang menjadi targetnya bukanlah aspek kognitif saja, melainkan totalitas dari semua aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jika demikian maka penilaian seharusnya dilakukan terhadap semua aspek dengan menempatkan pengamalan menjadi aspek yang penting dan menentukan. Dengan kata lain keberhasilan dan kegagalan pendidikan agama sangatlah bertumpu pada pengamalan agama peserta didik.

Bahkan lebih jauh dari itu, apabila pendidikan agama sebagai kunci dari bidang studi lainnya dalam setiap satuan pendidikan, maka penilaian agama seharusnya dilakukan lebih berhati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun akademik. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak jarang pendidikan agama justru dipakai sebagai “back up” pendidikan yang sulit dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa pendidikan agama hanya dipakai untuk

legalisasi yang lainnya, bahkan untuk kepentingan dakwah. Praktek-praktek pendidikan yang demikianlah yang sebenarnya menyulitkan siapapun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan agama. Menyadari akan kondisi obyektif pelaksanaan pendidikan agama di lapangan, yang paling esensial adalah semuanya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berorientasi kepada apresiasi yang proporsional terhadap eksistensi peserta didik, sehingga mereka akan siap menjadi anggota masyarakat yang bermartabat dan *wel-adapted*.

### **Implikasi rekonstruksi peran pendidikan agama**

Rekonstruksi peran pendidikan agama yang kita bangun pada dasarnya memiliki banyak implikasi. *Pertama*, implikasi bagi institusi. Institusi pendidikan apapun seharusnya memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan pendidikan agama sebagai subsistem yang menentukan dalam mengembangkan peserta didik secara utuh, sehingga semua komponen pendidikan dalam suatu institusi pendidikan harus memiliki hubungan interkatif-fungsional.

*Kedua*, implikasi bagi personil pendidikan (tenaga kependidikan dan non kependidikan). Semua personal pendidikan perlu memiliki bahasa yang sama dalam implementasi pendidikan agama, terlebih-lebih guru agama dan kepala sekolah. Mereka harus menjadi model yang bertanggung jawab bagi transfer dan transformasi nilai-nilai agama. Dengan demikian tuntutan keprofesionalan terhadap kehadiran guru agama merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

*Ketiga*, implikasi bagi peran orangtua dan masyarakat. Orangtua dan masyarakat (tokoh masyarakat) memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan keberhasilan pendidikan agama, sehingga kerjasama yang baik, harmonis, dan fungsional antara orangtua dan masyarakat dengan sekolah sangat diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial dan cultural yang kondusif bagi kehidupan beragama.

### **Penutup**

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang dapat dikemukakan sebagai pemicu untuk mengembangkan diskusi tentang rekonstruksi peran pendidikan agama dalam membangun masyarakat humanis dan pluralis.

### **Daftar Pustaka**

Brameld, Theodore, (1965), *Education as Power*, London: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Langgulung, Hasan (1988), *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*, Jakarta: Percetakan radar Jaya Offset.

Mua'llim, Amir (2003), *Humanisme Islam Bukan Ide Parsial*, <http://www.jawapos.co.id>

Shihab, Quraish, (1992), *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Penerbit Mizan

Usa, Muslih Usa dan Wijdan, Aden (1997) ***Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial***, Yogyakarta:Aditya Media